

# Sektor Pariwisata Bali Harus Dikendalikan

Saat ini, Bali berada dalam suatu titik, di mana sektor pariwisata mendapatkan perlawanan rakyat. Kasus Tahura Ngurah Rai dan reklamasi di Tanjung Benoa, adalah sebuah fenomena perlawanan rakyat yang paling panas. Hal seperti ini nyaris tidak ada dalam pembangunan pariwisata di Bali, 30 tahun lalu. Dalam teori-teori pembangunan, memang ada situasi, di mana rakyat mulai berani melakukan perlawanan. Pencetusnya adalah ketidakadilan sosial. Isu yang paling deras berkembang selama ini di Bali adalah bahwa (i) rakyat Bali tidak mendapatkan "kue" yang proporsional dari hasil pembangunan pariwisata, (ii) sekitar 50% keuntungan sektor pariwisata lari ke luar Bali/Indonesia, (iii) terdesaknya penduduk Bali oleh migran yang datang bagaikan deru gelombang tsunami, (iv) ada kekhawatiran kebudayaan Bali akan rusak, (v) fisik Bali (sawah, pantai, jurang, sungai, bukit, hutan) bopeng dan rusak berat, (vi) biaya sosial (*social cost*) yang harus diterima masyarakat Bali sangat berat (harga mahal, air macet, jalan macet, kumuh, kriminal, penyakit AIDS), (vii) kemiskinan struktural tak bisa dipecahkan, (viii) petani yang merupakan pendukung kuat kebudayaan Bali terganggu oleh sektor pariwisata, dan lain-lain.

Oleh

Wayan Windia

Ralu, apa yang kini harus dilakukan? Dalam dunia militer, ada yang disebut dengan proses konsolidasi, setelah melakukan masa pertempuran yang panjang. Demikian pula halnya dalam pembangunan sektor pariwisata di Bali. Setelah lebih dari 30 tahun pembangunan pariwisata Bali terus berlanjut, maka kini sudah saatnya Bali melakukan proses konsolidasi. Tujuannya adalah untuk melakukan introspeksi dan internalisasi, atau *money and audit* (Bali: *neliek buku*), terhadap filsafat/konsep pembangunan pariwisata Bali, dan hasil pelaksanaannya di lapangan.

Bali telah bersepakat bahwa pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata-budaya. Artinya, sektor pariwisata dikembangkan harus di atas landasan kebudayaan Bali. Antropolog Koentjaraningrat menyebutkan bahwa wujud dari kebudayaan (*budaya*) ada tiga, yakni artefak (fisik), sosial, dan nilai-nilai.

Secara fisik, Pulau Bali jelas sudah bopeng-bopeng (intrusi air laut sudah merajalela, erosi, abrasi, air tanah, sawah, dan hutan merosot, dan wajah Bali sangat bopeng), secara sosial, Bali sudah penuh konflik (antarbanjar, antardesa, antarsektor, bom, AIDS, kriminalitas), secara nilai Bali sudah tidak lagi implementatif (ada kecenderungan implementasi: Ti Hita Karana, Tatwan Asi, Arts Kosala Kosali, dan lain-lain

hanya dalam biasan bibir).

Landasan pariwisata yang goyah itu, sudah ditandai dengan gejala, yakni adanya perlawanan rakyat terhadap beberapa kasus pengembangan pariwisata.

## Menentang Reklamasi

Dengan demikian, tampaknya dapat dikatakan bahwa pembangunan sektor pariwisata di Bali sudah melenceng jauh dari cita-cita dan landasan dasarnya. Itulah gunanya melakukan introspeksi dan internalisasi pembangunan sektor pariwisata Bali, yakni untuk melakukan perubahan terhadap paradigma pembangunan sektor pariwisata ke depan. Sektor pariwisata Bali yang kini sangat kapitalis, harus diubah menjadi sektor untuk pemberdayaan rakyat. Hentikan pembangunan hotel-hotel besar yang sangat kapitalis dan kanibalistis terhadap sawah. Lalu alihkan kebijakan, dengan melakukan pembangunan pariwisata di pedesaan, dengan pemberdayaan petani dan melibatkan subak dan desa adat.

Risikonya, perkembangan pariwisata Bali akan melambat. Namun hal itu tidak apa-apa, kalau memang dilandasi pada kesepakatan bersama. Saat ini, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan rakyat di Bali, jauh lebih penting dibandingkan dengan melanjutkan pembangunan pariwisata yang kapitalis. Masalahnya adalah, apakah para pejabat dan elite di DPRD

” Saat ini, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan rakyat di Bali, jauh lebih penting dibandingkan dengan melanjutkan pembangunan pariwisata yang kapitalis. Masalahnya adalah, apakah para pejabat dan elite di DPRD bisa sepakat dengan konsep ini? Sudah dari “sononya” kaum pejabat tidak suka dengan pembangunan yang lambat tapi mendasar, dengan aliran uang yang seret. Mereka umumnya tidak suka membangun sektor pertanian, pedesaan, dan lain-lain. ”

bisa sepakat dengan konsep ini? Sudah dari “sononya” kaum pejabat tidak suka dengan pembangunan yang lambat tapi mendasar, dengan aliran uang yang seret. Mereka umumnya tidak suka membangun sektor pertanian, pedesaan, dan lain-lain. Mereka sukanya membangun pabrik, hotel, dan bangunan megah, yang sifatnya *quick yielding*. Maklum, umur kekuasaannya hanya berkisar 5-10 tahun, dan dengan biaya politik (politik-uang) yang sangat besar. Belum lagi, kalau uang yang mereka gunakan berasal dari kaum investor dan kapitalis.

Karena implikasi pembangunan yang sangat kapitalis sangat rawan, maka itulah saya menentang reklamasi di Tanjung Benoa, komersialisasi Tahura Ngurah Rai, pembangunan jalan tol (JDP), pembangunan bandara di Buleleng, dan pembangunan fisik lainnya yang massif. Karena diyakini bahwa pembangunan fisik seperti itu hanya untuk melayani syahwat kepentingan kaum kapitalis. Karena kapitalis (internasional) telanjur membangun hotel, dan lain-lain, lalu ada migran, lalu jalan macet, lalu dibangunlah jalan *underpass*, jalan tol, jalan *by-pass*, bandara, revisi perda ketetapan bangunan, dan lain-lain.

Kita akhirnya terjebak hanya bekerja untuk melayani kaum kapitalis, yang untung investasinya justru lari ke luar Bali (Indonesia). Kapan kita bekerja langsung untuk pemberdayaan masyarakat kecil? Untuk itulah kita sekarang perlu segera mengendalikan pembangunan sektor pariwisata di Bali. Tujuannya, agar Bali tidak segera hancur, dan remuk redam.

Penulis, Guru Besar, dan Ketua Pusat Studi Subak Univ. Udayana